

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 278 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bojongsoang untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bojongsoang untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Bojongsoang merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bojongsoang untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Bojongsoang bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Bojongsoang dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Bojongsoang agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bojongsoang;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Bojongsoang.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Bojongsoang dalam menyusun Renja Kecamatan Bojongsoang.

(2) Renstra Kecamatan Bojongsoang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bojongsoang paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Bojongsoang; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bojongsoang.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Bojongsoang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Bojongsoang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Bojongsoang; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Bojongsoang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 5

(1) Kecamatan Bojongsoang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Bojongsoang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Bojongsoang terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Bojongsoang.
(3) Camat Bojongsoang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Bojongsoang.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Bojongsoang dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Bojongsoang mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Bojongsoang dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Bojongsoang, maka Renstra Kecamatan Bojongsoang dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Bojongsoang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Bojongsoang.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 278

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 278 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BOJONGSOANG
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi landasan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Instruksi ini menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan daerah dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang mengusung misi Asta Cita, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi serta penguatan potensi lokal. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan arah

pembangunan yang lebih terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki kedudukan strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Camat, sebagai pimpinan kecamatan, melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan kedudukannya tersebut, Kecamatan Bojongsoang memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan terlaksananya program dan kegiatan secara efektif dan efisien di tingkat wilayah. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung, diperlukan dokumen perencanaan strategis di tingkat kecamatan yang memuat arah pembangunan menengah. Oleh karena itu, disusunlah Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Bojongsoang.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bojongsoang dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Renstra ini juga menjadi alat kontrol dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahhun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Mendtri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Derah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Bojongsoang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang, antara lain, adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);

c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bojongsoang;
d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3.3 Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta menyajikan dasar hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan, diikuti dengan penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan dokumen ini.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran Bab ini memuat penjelasan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Bojongsoang, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan. Pada subbab Permasalahan dan Isu Strategis dijelaskan pula hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap visi, misi dan 6 program Kepala Daerah.

c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat uraian mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bojongsoang yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan, serta strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan terukur.

d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bojongsoang, lengkap dengan indikator, target kinerja, serta pagu indikatif. Bab ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra dalam mendukung RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

e. BAB V PENUTUP

Penutup berisi simpulan atas keseluruhan isi dokumen Renstra dan penegasan komitmen Kecamatan Bojongsoang dalam melaksanakan perencanaan strategis secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bojongsoang

Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang berada di garis terdepan, kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa maupun kelurahan, sekaligus sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya. Pelayanan di Kecamatan Bojongsoang mencakup berbagai aspek, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan tertentu, pelayanan informasi publik, fasilitasi pembangunan wilayah, serta pembinaan masyarakat dan kelembagaan desa. Dalam penyelenggaraannya, kecamatan berupaya mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip profesionalisme aparatur. Selain pelayanan administratif, Kecamatan Bojongsoang juga berperan dalam mengoordinasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui perangkatnya, kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), monitoring pembangunan desa, hingga pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan prioritas pemerintah daerah sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Bojongsoang terus mendorong penerapan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi layanan online untuk administrasi kependudukan maupun perizinan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan menekan praktik birokrasi yang berbelit-belit. Secara keseluruhan, gambaran pelayanan Kecamatan Bojongsoang menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, memberdayakan, dan melindungi masyarakat. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan sistem pelayanan yang semakin modern, Kecamatan Bojongsoang berupaya menghadirkan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

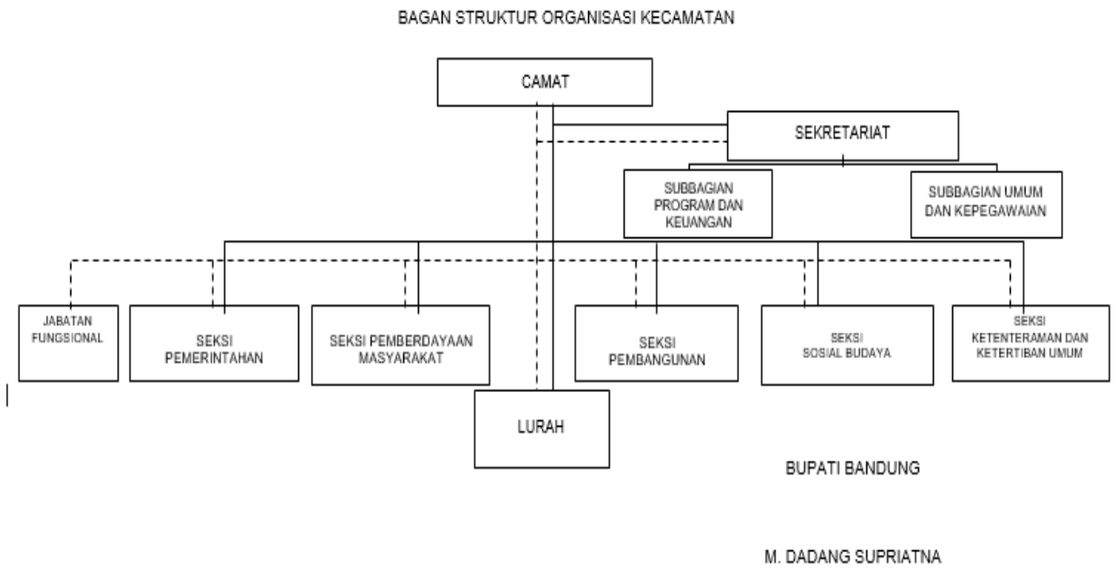
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
c. Subbagian Program dan Keuangan; dan
d. Subbagian Umum dan Kepegawaian
e. Seksi Pemerintahan;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Seksi Pembangunan;
h. Seksi Sosial Budaya;
i. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
j. Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bojongsoang sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Bojongsoang



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; CAMAT Subbag Umum dan Kepegawaian Subbag Program dan Keuangan Seksi Trantibum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemerintahan Seksi Pembangunan Seksi Sosial budaya Sekretaris Camat
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja secretariat

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan subbagian dan seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bojongsoang

Sumber Daya Kecamatan Bojongsoang merupakan aspek kewilayahan yang menggambarkan akan potensi Perangkat Daerah khususnya pada Kecamatan Bojongsoang.

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Bojongsoang pada tahun 2025, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 26 orang pegawai 18 orang ASN dan 8 orang non ASN (PHL). Apabila dibandingkan dengan beban kerja, berdasarkan hasil analisa jabatan dan berdasarkan kebutuhan organisasi yang ada, maka perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan aparatur terhadap pengetahuan perundang-undangan maupun pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas kinerja berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya. Sehingga dapat menunjang terhadap target capaian. Keadaan personil kecamatan Bojongsoang pertanggal 1 Januari 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S.3	0	0	0
2.	S.2	1	1	0
3.	S.1	11	9	2
4.	D.III	4	2	2
5.	SLTA	7	5	2
6.	SLTP	0	0	0
7.	SD	0	0	0

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Tabel 2.1 Menunjukan, Pegawai Kecamatan Bojongsoang Berdasarkan Tingkat Pendidikan terdiri dari : SLTA berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) pegawai Laki-laki dan 2 (dua) Pegawai Perempuan, D.III : Berjumlah 4 (empat) Orang, 2 (dua) pegawai Laki-laki dan 2 (dua) orang pegawai perempuan, S.1 Berjumlah 11 (sebelas) orang, 9 (sembilan) pegawai Laki-laki dan 2 (dua) orang pegawai perempuan dan S.2 : 1 (satu) orang. Secara pendidikan masih banyak pegawai yang latar belakang pendidikan nya tidak sesuai dengan jabatan nya akan tetapi ada beberapa pegawai Kecamatan Bojongsoang yang sedang mengikuti jenjang pendidikan S.1 sebanyak 2 (dua) orang. Hal tersebut untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara linier.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Pangkat,Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan	Status Kepegawaian			Jenis Kelamin		Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV/b	0	0	0	0	0	0
2	Golongan IV/a	1	0	0	1	0	1
3	Golongan III/d	4	0	0	2	2	4

No.	Pangkat/Golongan	Status Kepegawaian			Jenis Kelamin		Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	Laki-Laki	Perempuan	
4	Golongan III/c	1	0	0	1	0	1
5	Golongan III/b	3	0	0	3	0	3
6	Golongan III/a	1	1	0	1	0	1
7	Golongan II/d	3	0	0	3	0	3
8	Golongan II/c	2	0	2	0	2	4
9	Golongan II/b	2	0	1	2	0	3
10	Golongan II/a	0	0	0	0	0	0
11	Golongan I/b	0	0	0	0	0	0
12	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0
Jumlah		17	1	2	13	4	18

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Yang Telah Melaksanakan Diklat PIM Tahun 2025

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	0	0	0
2.	Diklatpim IV	5	5	0

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Aset Perangkat Daerah

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang tercatat dalam dokumen barang milik daerah, dengan kondisi baik hasil dari sisa penyusutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun data asset Kecamatan Bojongsoang, sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Inventaris Aset Kecamatan Bojongsoang

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	215,280,000.00	
			Lap Top	8	5,995,000.00	
		1.3.2.15.03.03.041	Handy Talky (HT)	1	2,860,000.00	
			Facsimile	2	2,904,000.00	
		1.3.2.06.02.01.006	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	157,303,800.00	
		1.3.2.06.02.01.010	Sepeda Motor	22	16,875,000.00	
			A.C. Split	1	7,500,000.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.02.01.02.003	A.C. Split	2	8,976,000.00	
			Rak-Rak Penyimpan	1	495,000.00	
		1.3.2.02.01.04.001	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6	1,996,500.00	
		1.3.2.05.02.04.004	Lemari Besi/Metal	1	415,800.00	
		1.3.2.05.02.04.004	Filing Cabinet Besi	1	1,000,000.00	
		1.3.2.04.01.04.004	Filing Cabinet Besi	2	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.01.002	Filing Cabinet Besi	3	1,000,000.00	
			Filing Cabinet Besi	4	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.04.001	Filing Cabinet Besi	5	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	6	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	7	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	8	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	9	2,500,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	2,500,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	11	1,900,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	12	1,900,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Lemari Kaca	1	4,994,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Papan Nama Instansi	1	3,993,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Papan Pengumuman	1	3,960,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	1	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	2	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	3	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	4	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	5	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	6	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	7	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	8	625,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	9	15,983,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Alat Kantor Lainnya	10	14,960,000.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Genset	1	15,548,387.00	
		1.3.2.05.01.04.005	Lemari Kayu	1	2,000,000.00	
		1.3.2.05.01.04.027	Rak Kayu	1	1,000,000.00	
		1.3.2.05.01.05.076	Meja Kerja Kayu	1	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.077	Meja Kerja Kayu	2	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	3	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	4	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	5	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	6	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	7	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	8	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	9	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	10	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	11	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	12	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	13	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	14	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	15	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Kerja Kayu	16	327,600.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Kursi Besi/Metal	1	2,992,000.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Kursi Besi/Metal	2	2,992,000.00	
			Sice	1	2,500,000.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.05.01.05.088	Tempat Tidur Kayu	1	2,500,000.00	
		1.3.2.05.01.05.088	Meja Rapat	1	10,000,000.00	
		1.3.2.06.03.47.002	Kursi Rapat	1	300,000.00	
		1.3.2.05.01.04.002	Kursi Rapat	2	300,000.00	
		1.3.2.05.01.04.004	Kursi Rapat	3	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	4	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	5	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	6	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	7	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	8	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	9	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	10	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	11	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	12	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	13	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	14	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	15	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	16	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	17	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	18	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	19	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	20	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	21	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	22	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	23	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	24	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	25	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	26	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	27	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	28	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	29	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	30	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	31	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.002	Kursi Rapat	32	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.003	Kursi Rapat	33	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.003	Kursi Rapat	34	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.005	Kursi Rapat	35	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.010	Kursi Rapat	36	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.008	Kursi Rapat	37	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.008	Kursi Rapat	38	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	39	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	40	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	41	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	42	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	43	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	44	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	45	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	46	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	47	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	48	300,000.00	
		1.3.2.05.02	Kursi Rapat	49	300,000.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	50	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	51	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	52	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	53	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	54	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	55	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	56	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	57	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	58	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	59	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	60	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	61	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	62	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	63	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	64	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	65	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	66	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	67	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	68	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	69	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	70	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	71	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	72	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	73	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	74	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	75	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	76	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	77	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	78	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	79	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	80	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	81	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	82	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	83	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	84	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	85	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	86	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	87	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	88	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	89	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	90	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	91	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	92	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	93	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	94	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	95	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	96	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	97	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	98	300,000.00	
		.01.030 1.3.2.05.02	Kursi Rapat	99	300,000.00	
		.01.030	Kursi Rapat	100	300,000.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	101	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	102	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	103	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	104	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	105	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	106	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	107	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	108	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	109	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	110	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	111	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	112	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	113	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	114	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	115	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	116	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	117	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	118	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	119	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	120	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	121	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	122	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	123	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	124	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	125	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	126	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	127	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	128	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	129	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	130	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	131	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	132	300,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Tamu	1	534,600.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Tamu	2	534,600.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Tamu	3	534,600.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Tamu	4	534,600.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Putar	1	478,400.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Putar	2	490,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Putar	3	2,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Komputer	7	513,850.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Komputer	8	518,400.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Tenda	1	11,755,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Tenda	2	29,250,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	1	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	2	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	3	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	4	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	5	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	6	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	7	615,000.00	
		1.3.2.05.02	Meja 1/2 Biro	8	615,000.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	9	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	10	615,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	11	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	12	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	13	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	14	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	15	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	16	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	17	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	18	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	19	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja 1/2 Biro	20	715,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	1,100,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Tabung Gas	1	1,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Dapur lainnya	1	1,200,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sound System	1	10,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Stabilisator	1	2,950,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Dispenser	1	1,250,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Dispenser	2	500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	4	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	5	5,995,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	6	5,995,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	7	5,995,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	8	5,995,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	9	5,995,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	10	5,995,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	1,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	1,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	2,397,878.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1,784,750.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1,496,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Stabilizer/UPS	1	750,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Kerja Pejabat Eselon III	17	7,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Kerja Kayu	18	1,875,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Kerja Kayu	19	1,875,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Kerja Kayu	20	1,875,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Kerja Kayu	1	1,875,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	1,250,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1,250,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Facsimile	3	1,980,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Televisi	14	6,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	1,800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030		13		

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.05.02.01.030	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6	2,200,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Filing Cabinet Besi	1	2,600,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lap Top	3	7,700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Es	4	1,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	5	750,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	6	750,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	1	750,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	2	750,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sofa	2	6,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sofa	1	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sound System	2	29,800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Truck + Attachment	14	327,383,500.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Es	15	1,800,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Filing Cabinet Besi	4	3,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Filing Cabinet Besi	3	3,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Televisi	1	4,700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sound System	7	7,700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Mesin Absensi	1	12,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lap Top	2	10,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	7	7,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Layar Film/Projector	8	8,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	9	700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	10	700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	3	700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Besi/Metal	1	700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sofa	2	10,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Penyimpan	1	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Penyimpan	2	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Alat Tangki Pengapungan	11	3,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Papan Nama Instansi	12	1,700,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Gerobak Dorong	13	4,030,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Gerobak Dorong	14	4,030,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Gerobak Dorong	15	4,030,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Gerobak Dorong	16	4,030,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Gerobak Dorong	9	4,030,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Gerobak Dorong	1	4,030,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lap Top	4	8,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	A.C. Window	2	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Sofa	2	7,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Kaca	5	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Tempat Tidur Kayu	2	12,500,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kursi Tamu	1	11,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Rak Kayu	1	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meubeleur lainnya	1	3,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Meja Makan Besi	3	6,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Makan	13	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Kitchen Set	14	10,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	Lemari Es	16	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	17	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02.01.030	P.C Unit	18	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Filing Cabinet Besi			

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		.01.030	Filing Cabinet Besi	19	3,500,000.00	
		1.3.2.05.02	Filing Cabinet Besi	4	3,500,000.00	
		.01.030	Filing Cabinet Besi	5	3,500,000.00	
		1.3.2.05.02	Dispenser	6	3,500,000.00	
		.01.031	Dispenser	7	1,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Dispenser	8	1,000,000.00	
		.01.031	Dispenser	17	1,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Dispenser	18	1,000,000.00	
		.01.031	Gerobak Dorong	19	1,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Gerobak Dorong	20	4,000,000.00	
		.01.032	Gerobak Dorong	21	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Gerobak Dorong	22	4,000,000.00	
		.01.032	Gerobak Dorong	23	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Gerobak Dorong	24	4,000,000.00	
		.01.032	Gerobak Dorong	25	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Gerobak Dorong	26	4,000,000.00	
		.01.039	Gerobak Dorong	27	4,000,000.00	
		1.3.2.15.03	Gerobak Dorong	28	4,000,000.00	
		.02.005	Gerobak Dorong	7	4,000,000.00	
		1.3.2.15.03	Gerobak Dorong	8	4,000,000.00	
		.02.005	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	4,000,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	13	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	14	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	17	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	18	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	20	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	22	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	23	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	25	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	26	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	27	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	28	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	29	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	30	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	31	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	32	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	33	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	34	616,000.00	
		.01.024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	616,000.00	
		.01.024	Perahu Penyeberangan	6	616,000.00	
		1.3.2.05.02	Perahu Penyeberangan	4	26,454,500.00	
		.01.024	Televisi	5	26,454,500.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
		1.3.2.05.02.01.024	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	25	6,400,000.00	
		1.3.2.05.02.05.005	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	3,000,000.00	
		1.3.2.05.02.05.009	Sepeda Motor	3	3,000,000.00	
		1.3.2.05.02.05.026	A.C. Window	4	29,300,000.00	
		1.3.2.05.02.06.008	A.C. Window	5	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.020	A.C. Window	1	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.038	A.C. Window	2	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.038	Rak Besi	10	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Rak Besi	11	7,250,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Lap Top	15	7,250,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Lap Top	16	7,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	P.C Unit	15	7,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	P.C Unit	17	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	5,000,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	2,500,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2,500,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	2,500,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Lap Top	1	2,500,000.00	
		1.3.2.05.02.06.077	Lap Top	2	7,000,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	27	7,000,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Mesin Pemotong Rumput	21	1,850,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	22	1,750,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	23	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	24	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	25	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	26	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	11	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	12	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Meja Kerja Kayu	13	2,500,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Kursi Besi/Metal	15	2,000,000.00	
		1.3.2.10.01.02.001	Kursi Besi/Metal	16	2,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Kursi Besi/Metal	1	2,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Kursi Besi/Metal	3	2,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Kursi Besi/Metal	2	2,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	CCTV - Camera Control Television System	26	2,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Rak Kayu	27	4,500,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Gordyin/Kray	14	1,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Sepeda Motor	8	16,000,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Sepeda Motor	2	27,700,000.00	
		1.3.2.10.02.03.003	Lap Top	15	15,500,000.00	
		1.3.2.08.01.41.249	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	16	9,500,000.00	
			Mesin Absensi	1	1,500,000.00	
			Lap Top	17	2,800,000.00	
			Lap Top	19	9,500,000.00	
			Tangga Aluminium	20	9,500,000.00	
			Lap Top	21	3,000,000.00	
			Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	9,500,000.00	
			Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	3,000,000.00	
				2	1,800,000.00	
				20	1,800,000.00	

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
			Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	5,000,000.00	
			Scanner (Universal Tester)	17	4,500,000.00	
			Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	3,500,000.00	
			Lemari Besi/Metal	1	2,800,000.00	
			Filing Cabinet Besi	1	2,800,000.00	
			Filing Cabinet Besi	2	2,500,000.00	
			Kursi Besi/Metal	3	2,500,000.00	
			Kursi Besi/Metal	35	1,925,000.00	
			Alat Kedokteran umum lainnya	1	550,000.00	
			Pompa Tangan	2	550,000.00	
			Pompa Tangan		550,000.00	
					3,000,000.00	
					2,500,000.00	
					698,500.00	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Bojongsoang

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kecamatan Bojongsoang sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu, penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan merupakan langkah strategis dalam menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat tercapai sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Bojongsoang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menjadi pijakan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Sebelum melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan, penting untuk terlebih dahulu memaparkan data dasar kecamatan. Data ini mencakup kondisi geografi, demografi, serta aspek pelimpahan kewenangan yang menjadi landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan program di kecamatan. Pemaparan data dasar tersebut memberikan gambaran awal mengenai potensi, tantangan, serta karakteristik wilayah yang akan sangat memengaruhi arah kebijakan dan strategi pembangunan. Dengan

demikian, penilaian kinerja yang dilakukan nantinya dapat lebih terukur, objektif, dan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Bojongsoang

a. Demografi dan Geografi Kecamatan Bojongsoang

Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki sejarah perkembangan yang erat kaitannya dengan dinamika pembangunan wilayah Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Kecamatan ini pada awalnya terbentuk sebagai bagian dari upaya penataan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Secara geografis, Kecamatan Bojongsoang memiliki wilayah yang strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, serta dilalui oleh berbagai jalur transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah pedesaan.

Seiring dengan perkembangan wilayah metropolitan Bandung Raya, Bojongsoang mengalami pertumbuhan pesat baik dari segi jumlah penduduk, aktivitas perekonomian, maupun pembangunan infrastruktur. Kawasan ini berkembang dari daerah agraris dengan basis pertanian dan perikanan menjadi wilayah dengan karakteristik semi-perkotaan yang dipengaruhi oleh perkembangan kawasan pendidikan, industri, dan perumahan. Selain itu, Kecamatan Bojongsoang juga memiliki potensi sumber daya alam serta kawasan yang strategis, salah satunya ditandai dengan keberadaan Sungai Citarum yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus objek perhatian dalam program nasional pengelolaan lingkungan.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kecamatan Bojongsoang terus bertransformasi menjadi wilayah dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan pembangunan yang semakin beragam. Perubahan demografi, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, serta tuntutan pembangunan yang berorientasi pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang modern menjadi bagian dari dinamika kecamatan ini. Oleh karena itu, keberadaan Kecamatan Bojongsoang diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mendukung visi

pembangunan Kabupaten Bandung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis, Kecamatan Bojongsoang terletak di bagian timur laut Kabupaten Bandung dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bandung. Adapun batas-batas administratif Kecamatan Bojongsoang adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Gedebage Kota Bandung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baleendah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciparay, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dayeuhkolot. Letak tersebut menjadikan Bojongsoang sebagai salah satu kawasan penyangga perkotaan yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Secara administratif Kecamatan Bojongsoang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Rancasari
Sebelah Selatan : Kecamatan Baleendah
Sebelah Timur : Kecamatan Ciparay
Sebelah Barat : Kecamatan Dayeuhkolot

Kecamatan Bojongsoang saat ini membawahi 6 (Enam) Desa yaitu :

1) Desa Bojongsoang
2) Desa Lengkong
3) Desa Cipagalo
4) Desa Buabatu
5) Desa Bojongsari
6) Desa Tegalluar

Data demografi Kecamatan bojongsoang mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi usia yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan

infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Tabel 2.5 Reakpitulasi Jumlah Penduduk

Desa	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
Bojongsoang	21.591	4,48	10.813	10.778
Lengkong	15.568	3,29	7.867	7.701
Cipagalo	20.657	4,22	10.363	10.294
Buahbatu	14.625	1,90	7.351	7.274
Bojongsari	19.172	6,11	9.788	9.384
Tegalluar	17.670	5,820	9.054	8.816
TOTAL	109.483	10,66	55.236	54.247

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Berdasarkan data demografi, jumlah penduduk di Kecamatan Bojongsoang tercatat sebanyak 109.483 jiwa, yang terdiri dari 55.236 laki-laki dan 54.247 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar di enam desa dengan karakteristik kepadatan yang bervariasi. Desa Bojongsoang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 21.591 jiwa, diikuti oleh Desa Cipagalo dengan 20.657 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk terendah adalah Desa Buahbatu dengan 14.625 jiwa.

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Bojongsoang tahun 2025, desa dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Bojongsari dengan 6,11 jiwa/km² dan Tegalluar dengan 5,820 jiwa/km². Tingginya kepadatan di kedua desa ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan ruang hunian, infrastruktur dasar, serta layanan publik. Oleh karena itu, intervensi yang perlu dipersiapkan mencakup penataan tata ruang untuk mengendalikan laju pertumbuhan permukiman, penyediaan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi yang memadai, serta penguatan transportasi umum guna mengantisipasi kemacetan akibat mobilitas tinggi. Selain itu, layanan kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan kapasitasnya untuk menampung jumlah penduduk yang padat, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang kualitas lingkungan. Dengan intervensi yang tepat, desa berpenduduk padat dapat tetap tumbuh secara produktif tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakatnya.

Berdasarkan data jenis kelamin Kecamatan Bojongsoang tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki tercatat

sebanyak 55.236 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 54.247 jiwa. Selisihnya hanya 989 jiwa, sehingga komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang dan tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Keseimbangan ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan dapat diarahkan secara inklusif tanpa harus menitikberatkan pada salah satu jenis kelamin. Namun demikian, tetap diperlukan perhatian khusus terhadap akses dan kesempatan yang setara, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal. Selain itu, potensi tenaga kerja laki-laki yang sedikit lebih tinggi dapat dimaksimalkan pada sektor-sektor produktif, sementara pemberdayaan perempuan perlu terus diperkuat melalui program ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, keseimbangan demografi ini dapat menjadi modal sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

b. Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Bojongsoang

Terkait Tata Pemerintahan Kecamatan Bojongsoang merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam rangka menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai kepala perangkat daerah didasarkan pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Ruang lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut meliputi:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

- Sosial;
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pertanahan;
- Lingkungan Hidup;
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Komunikasi dan Informatika;
- Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- Penanaman Modal;
- Kepemudaan dan Olahraga;
- Kebudayaan;
- Pariwisata;
- Pertanian.

c. Potensi Kecamatan Bojongsoang

Kecamatan Bojongsoang merupakan wilayah strategis yang berada di bagian tenggara Kota Bandung. Secara geografis, Bojongsoang memiliki lokasi yang sangat menguntungkan karena berbatasan langsung dengan pusat kota, menjadikannya sebagai kawasan penyangga yang ideal untuk pengembangan urban dan suburban. Kedekatannya dengan Sungai Citarum juga memberikan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya air dan pengembangan ekowisata.

Dari sisi sumber daya alam (SDA), Bojongsoang memiliki lahan pertanian yang subur, terutama di daerah seperti Tegalluar dan Lengkong. Potensi pertanian padi, hortikultura, dan perikanan air tawar masih sangat terbuka untuk dikembangkan dengan pendekatan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, keberadaan lahan terbuka hijau dapat dimanfaatkan untuk pertanian urban dan konservasi lingkungan.

Dalam bidang ekonomi dan UMKM, Bojongsoang menunjukkan dinamika yang positif. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah bergerak di sektor kuliner, kerajinan tangan, konveksi, serta jasa kreatif. Dukungan terhadap UMKM melalui pelatihan, digitalisasi, dan akses permodalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

Potensi pariwisata Bojongsoang juga mulai berkembang, terutama dengan adanya kawasan wisata edukatif dan religi seperti Kampung Wisata Kreatif dan Masjid Terapung Al-Jabbar yang berada di sekitar Tegalluar. Keindahan alam, budaya lokal, dan aksesibilitas yang semakin baik menjadikan Bojongsoang sebagai destinasi wisata alternatif yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dari segi infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi publik terus mengalami peningkatan. Proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang memiliki stasiun di Tegalluar membuka peluang besar bagi Bojongsoang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik juga terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.

Dalam aspek sosial dan budaya, Bojongsoang memiliki masyarakat yang heterogen namun harmonis. Tradisi lokal seperti seni tari, musik Sunda, dan kegiatan keagamaan masih dijaga dengan baik. Semangat gotong royong dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan menjadikan Bojongsoang sebagai wilayah yang kuat secara sosial dan kaya akan nilai budaya.

Dalam lima tahun ke depan, Kecamatan Bojongsoang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi lokal dan pertanian. Dari sisi ekonomi, UMKM menjadi tulang punggung dengan dominasi usaha pangan olahan, kuliner, kerajinan, dan industri kreatif. Melalui dukungan permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan digitalisasi pemasaran, UMKM Bojongsoang berpeluang berkembang lebih pesat serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi pasar tradisional, penguatan jaringan distribusi, serta pengembangan pusat kuliner lokal juga dapat menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas yang memiliki daya tarik regional.

Sementara itu, sektor agrikultural masih menyimpan potensi besar, terutama pada lahan pertanian padi dan hortikultura. Dengan optimalisasi lahan, penerapan teknologi pertanian modern, dan sistem irigasi yang lebih efisien, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan hingga 20–30% sehingga mendukung ketahanan pangan lokal. Selain itu, praktik pertanian urban seperti hidroponik, aquaponik, dan pemanfaatan pekarangan produktif dapat dikembangkan di

setiap desa/kelurahan, menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Potensi lain yang menjanjikan adalah agro-wisata, yang dapat mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan pariwisata berbasis edukasi dan kuliner lokal. Dengan pengemasan yang menarik, Bojongsoang dapat menghadirkan destinasi wisata agro yang menjadi nilai tambah sekaligus sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi dan kelompok tani juga menjadi kunci dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi berbasis pertanian. Dengan arah pengembangan tersebut, dalam lima tahun mendatang Bojongsoang berpeluang menjadi kecamatan yang tangguh dalam ekonomi kreatif sekaligus mandiri dalam sektor pertanian.

Bojongsoang menawarkan peluang investasi nyata yang berakar pada kekuatan UMKM lokal dan basis pertanian yang masih produktif. Investor skala mikro hingga menengah bisa memanfaatkan ekosistem ini dengan fokus pada penguatan rantai nilai, hilirisasi produk pertanian, dan integrasi digital. Untuk sektor ekonomi, peluang utama meliputi fasilitas pengolahan pangan skala komunitas (unit pengemasan/pengolahan pangan olahan), pusat kuliner terintegrasi, platform *e-commerce* lokal, serta jasa logistik *last-mile* yang menghubungkan produk desa ke pasar regional. Investasi dalam inkubator UMKM — berupa pelatihan bisnis, akses modal mikro, dan pusat pemasaran digital — akan mempercepat profesionalisasi usaha kecil dan membuka pasar baru.

Kecamatan Bojongsoang memiliki potensi besar di sektor properti, terutama karena lokasinya yang strategis di wilayah penyangga Kota Bandung. Dengan aksesibilitas yang semakin baik melalui jalan utama dan konektivitas transportasi ke pusat kota, permintaan akan hunian terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan kampus besar, kawasan industri, serta pusat komersial di sekitar Bojongsoang mendorong tingginya kebutuhan akan perumahan bagi mahasiswa, pekerja, maupun keluarga muda.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Seluruh kewenangan yang dilimpahkan di atas menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Bojongsoang, yang pelaksanaannya selama periode tahun 2021 – 2026 perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara program kerja yang telah direncanakan pada awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas pada akhir tahun. Memperhatikan kompleksitas tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Kecamatan Bojongsoang tidak hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati tetapi juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya serta desa-desa di wilayahnya. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) dan indicator kinerja kunci (IKK) yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bojongsoang. IKU dan IKK ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi terhadap pencapaian IKU dan IKK menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan selanjutnya dalam periode perencanaan. Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung selama periode Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bojongsoang Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bojongsoang Tahun 2021-2026								
			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	65,00	66,50	102%	66,50	71,05	107%	72,00	75,60	105%
		Persentase BMD dalam kondisi baik	85%	85%	100%	80%	80%	100%	83%	83%	100%
Meningk	Meningkatnya Kualitas	Nilai IKM	80,00	88,83	111,04%	82,00	91,18	102,64%	83,00	92,10	103,47%

Tujuan	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bojongsoang Tahun 2021-2026								
			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
atnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	(*IKU)									
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang (*IKU)	0,00		0,00 %	0,00		0,00 %	1,00	2,00	200,00%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Berdasarkan table 2.5 capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bojongsoang Tahun 2021–2026, dapat terlihat bahwa secara umum indikator kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik dengan sebagian besar realisasi melampaui target yang ditetapkan. Pada tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, indikator nilai AKIP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 target sebesar 65,00 tercapai dengan realisasi 66,50 atau 102%. Tahun 2023 target sebesar 66,50 meningkat menjadi realisasi 71,05 atau 107%, dan pada tahun 2024 target 72,00 tercapai dengan realisasi 75,60 atau 105%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik yang konsisten.

Selanjutnya, pada indikator persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik, kinerja juga menunjukkan konsistensi. Pada tahun 2022 target 85% dapat dicapai sesuai target dengan realisasi 85%. Pada tahun 2023 target ditetapkan 80% dan realisasi mencapai 80% sehingga capaian 100%. Begitu pula di tahun 2024, target sebesar 83% tercapai penuh dengan realisasi 83%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan aset daerah sudah terjaga dengan baik.

Untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami capaian yang signifikan. Tahun 2022 target 80,00 terlampaui dengan realisasi 88,83 atau 111,04%. Tahun 2023 target 82,00 juga terlampaui dengan realisasi 91,18 atau 102,64%. Sementara itu di tahun 2024, target sebesar 83,00 tercapai dengan realisasi 92,10 atau 103,47%. Hasil ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Bojongsoang terus meningkat dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.

Pada indikator jumlah desa cepat berkembang, capaian mulai terlihat di tahun 2024. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi masih 0,00 sesuai target, namun di tahun 2024 target sebesar 1,00 justru terlampaui dengan realisasi 2,00 atau 200%. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi dalam perkembangan desa yang lebih cepat dari perkiraan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Bojongsoang pada periode 2022–2024 menunjukkan tren positif dengan sebagian besar indikator melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas, pengelolaan aset daerah, serta kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik, dan bahkan memberikan hasil yang lebih optimal dari rencana awal.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Bojongsoang pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Bojongsoang melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025– 2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(2)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
KECAMATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	65.00	66.50	72.00	73.00	74.00	66.50	71.05	75.60	#NA	#NA	102%	107%	105%	#NA	#NA
	Nilai IKM	80%	85%	86 Poin	87 Poin	89 Poin	80 Poin	91 Poin	92.10 Poin	#NA	#NA	100%	107%	107%	#NA	#NA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	0 Data	1 Data	1 Data	0 Data	0 Data	0 Data	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	18 Orang / Bulan	18 Orang / Bulan	18 Orang / Bulan	18 Orang / Bulan	12 Bulan	18 Orang / Bulan	18 Orang / Bulan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	#NA	#NA	0%	100%	0%	#NA	#NA
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	#NA	#NA	#NA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan															
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	dan Penggandaan yang Disediakan															
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	#NA	#NA	#NA	100%	#NA	#NA	#NA
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	#NA	#NA	#NA	100%	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									#NA	#NA				#NA	#NA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	85%	80%	83%	82%	85%	85%	80%	83%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#NA	#NA				#NA	#NA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 Poin	90 Poin	83 Poin	85 Poin	88 Poin	80 Poin	91 Poin	92.10 Poin	#NA	#NA	100%	107%	107%	#NA	#NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Non Perizinan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	90 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan															
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Pemanfaatan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Penyelenggaraan Urusan	Persentase Pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	100%	100%	100%	#NA	#NA
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#NA	#NA	#NA	100%	100%	#NA	#NA

PROGRAM/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Daerah dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa															

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bojongsoang kabupaten Bandung

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KECAMATAN	5,552,238,500.00	4,450,348,857.00	5,662,768,524.00	4,251,818,178.00	4,249,723,178.00	4,483,173,368.00	4,374,640,891.00	5,026,181,491.00	#NA	#NA	80.75 %	98.30 %	88.76 %	#NA	#NA	#NA	#NA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,219,155,000.00	4,049,138,957.00	4,782,211,213.00	3,951,818,178.00	3,951,818,178.00	4,237,012,474.00	3,995,881,691.00	4,407,597,491.00	#NA	#NA	81.18 %	98.68 %	92.17 %	#NA	#NA	#NA	#NA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,500,000.00	11,257,964.00	41,114,916.00	14,175,000.00	14,175,000.00	27,270,500.00	11,120,800.00	23,673,800.00	#NA	#NA	51.94 %	98.78 %	57.58 %	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	340,000.00	750,200.00	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	340,000.00	750,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	99.97 %	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.00	340,000.00	750,130.00	794,000.00	794,000.00	0.00	340,000.00	750,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	99.98 %	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	0.00	340,000.00	780,600.00	794,000.00	794,000.00	0.00	340,000.00	750,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	96.08 %	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0.00	340,000.00	793,800.00	794,000.00	794,000.00	0.00	340,000.00	793,800.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0.00	340,000.00	793,800.00	794,000.00	794,000.00	T	340,000.00	0.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	0.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52,500,000.00	9,557,964.00	37,246,386.00	5,000,000.00	5,000,000.00	27,270,500.00	9,420,800.00	20,630,000.00	#NA	#NA	51.94 %	98.56 %	55.39 %	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,589,419,000.00	3,523,062,055.00	4,011,267,544.00	3,517,325,178.00	3,517,325,178.00	3,669,913,140.00	3,497,708,838.00	3,681,213,752.00	#NA	#NA	79.96 %	99.28 %	91.77 %	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,581,919,000.00	3,522,499,555.00	4,003,768,144.00	3,509,825,178.00	3,509,825,178.00	3,667,253,540.00	3,497,147,238.00	3,680,028,952.00	#NA	#NA	80.04%	99.28%	91.91%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000.00	187,500.00	2,499,800.00	2,500,000.00	2,500,000.00	600,800.00	187,200.00	699,800.00	#NA	#NA	24.03%	99.84%	27.99%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2,500,000.00	187,500.00	2,499,800.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,458,000.00	187,200.00	485,000.00	#NA	#NA	58.32%	99.84%	19.40%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,500,000.00	187,500.00	2,499,800.00	2,500,000.00	2,500,000.00	600,800.00	187,200.00	0.00	#NA	#NA	24.03%	99.84%	0.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0.00	6,971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971,000.00	0.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	6,971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971,000.00	0.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	56,018,000.00	74,174,400.00	157,250,375.00	60,318,000.00	60,318,000.00	48,857,880.00	67,655,000.00	149,728,075.00	#NA	#NA	87.22%	91.21%	95.22%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	2,496,800.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,600.00	2,489,000.00	2,496,800.00	#NA	#NA	99.94%	99.56%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,000,000.00	40,637,000.00	127,523,900.00	28,300,000.00	28,300,000.00	21,544,880.00	40,597,000.00	126,729,600.00	#NA	#NA	89.77%	99.90%	99.38%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000.00	3,140,000.00	1,719,075.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,123,600.00	1,719,075.00	#NA	#NA	100.00%	99.48%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,018,000.00	5,099,400.00	3,017,600.00	3,018,000.00	3,018,000.00	2,951,400.00	5,049,800.00	939,600.00	#NA	#NA	97.79%	99.03%	31.14%	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,015,600.00	0.00	#NA	#NA	100.00%	50.78%	#DIV/0!	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,500,000.00	3,020,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	3,020,000.00	6,500,000.00	#NA	#NA	100.00%	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,000,000.00	17,778,000.00	15,993,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	10,363,000.00	12,360,000.00	11,343,000.00	#NA	#NA	69.09%	69.52%	70.92%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	0.00	36,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592,000.00	#NA	#NA	#NA	#NA	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	36,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592,000.00	#NA	#NA	#NA	#NA	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,718,000.00	334,384,038.00	404,729,680.00	315,000,000.00	315,000,000.00	291,324,254.00	316,233,488.00	392,506,266.00	#NA	#NA	92.27%	94.57%	96.98%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,181,000.00	43,576,038.00	48,497,480.00	40,000,000.00	40,000,000.00	17,122,990.00	39,033,488.00	37,618,666.00	#NA	#NA	77.20%	89.58%	77.57%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293,537,000.00	290,808,000.00	356,232,200.00	275,000,000.00	275,000,000.00	274,201,264.00	277,200,000.00	354,887,600.00	#NA	#NA	93.41%	95.32%	99.62%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,500,000.00	99,289,500.00	131,256,698.00	40,000,000.00	40,000,000.00	199,646,700.00	96,192,565.00	123,883,598.00	#NA	#NA	97.15%	96.88%	94.38%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14,100,000.00	19,510,000.00	16,957,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	9,246,700.00	16,413,300.00	9,583,900.00	#NA	#NA	65.58%	84.13%	56.52%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pemeliharaan Mebel	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	0.00%	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,500,000.00	4,260,000.00	4,300,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	4,260,000.00	4,300,000.00	#NA	#NA	100.00%	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185,900,000.00	75,519,500.00	109,999,698.00	10,000,000.00	10,000,000.00	185,900,000.00	75,519,265.00	109,999,698.00	#NA	#NA	100.00%	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158,633,500.00	171,930,100.00	364,779,631.00	112,875,000.00	112,875,000.00	114,183,400.00	170,963,700.00	251,697,400.00	#NA	#NA	71.98%	99.44%	69.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0.00	7,843,700.00	28,686,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,843,400.00	28,686,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0.00	4,403,000.00	14,343,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,403,000.00	14,343,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.00	3,440,700.00	14,343,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,440,400.00	14,343,000.00	#NA	#NA	#NA	99.99%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10,500,000.00	4,080,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,500,000.00	4,040,000.00	3,000,000.00	#NA	#NA	100.00%	99.02%	83.33%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10,500,000.00	4,080,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,500,000.00	4,040,000.00	3,000,000.00	#NA	#NA	100.00%	99.02%	83.33%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	148,133,500.00	160,006,400.00	332,493,631.00	97,875,000.00	97,875,000.00	103,683,400.00	159,080,300.00	220,011,400.00	#NA	#NA	69.99%	99.42%	66.17%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9,000,000.00	6,881,400.00	14,343,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,957,500.00	6,881,200.00	14,343,000.00	#NA	#NA	99.53%	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	139,133,500.00	153,125,000.00	318,150,631.00	88,875,000.00	88,875,000.00	94,725,900.00	152,199,100.00	205,668,400.00	#NA	#NA	68.08%	99.40%	64.64%	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69,450,000.00	50,351,500.00	265,145,000.00	48,125,000.00	50,000,000.00	68,987,200.00	50,127,800.00	157,773,000.00	#NA	#NA	99.33%	99.56%	59.50%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37,300,000.00	30,246,900.00	193,430,000.00	23,125,000.00	25,000,000.00	36,856,900.00	30,037,600.00	143,430,000.00	#NA	#NA	98.81%	99.31%	74.15%	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0.00	7,500,000.00	14,343,000.00	5,625,000.00	7,500,000.00	0.00	7,481,000.00	14,343,000.00	#NA	#NA	#NA	99.75%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29,800,000.00	7,446,900.00	14,343,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	29,789,000.00	7,367,600.00	14,343,000.00	#NA	#NA	99.96%	98.94%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,500,000.00	15,300,000.00	164,744,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,067,900.00	15,189,000.00	114,744,000.00	#NA	#NA	94.24%	99.27%	69.65%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	32,150,000.00	20,104,600.00	71,715,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	32,130,300.00	20,090,200.00	14,343,000.00	#NA	#NA	99.94%	99.93%	20.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	16,500,000.00	12,575,200.00	14,343,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	16,499,800.00	12,575,200.00	0.00	#NA	#NA	100.00%	100.00%	0.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15,650,000.00	4,128,840.00	43,029,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	15,630,500.00	4,115,000.00	0.00	#NA	#NA	99.88%	99.66%	0.00%	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0.00	3,400,560.00	14,343,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,400,000.00	14,343,000.00	#NA	#NA	#NA	99.98%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	11,030,000.00	86,229,000.00	25,000,000.00	21,030,000.00	14,973,000.00	10,933,000.00	79,029,000.00	#NA	#NA	99.82%	99.12%	91.65%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0.00	5,000,000.00	28,686,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	4,965,000.00	28,686,000.00	#NA	#NA	#NA	99.30%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	0.00	2,500,000.00	14,343,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,465,000.00	14,343,000.00	#NA	#NA	#NA	98.60%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0.00	2,500,000.00	14,343,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	14,343,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15,000,000.00	6,030,000.00	57,543,000.00	15,000,000.00	11,030,000.00	14,973,000.00	5,968,000.00	50,343,000.00	#NA	#NA	99.82%	98.97%	87.49%	#NA	#NA	#NA	#NA
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,000,000.00	6,030,000.00	57,543,000.00	15,000,000.00	11,030,000.00	14,973,000.00	5,968,000.00	50,343,000.00	#NA	#NA	99.82%	98.97%	87.49%	#NA	#NA	#NA	#NA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40,000,000.00	80,842,300.00	88,607,600.00	40,000,000.00	40,000,000.00	6,090,000.00	72,839,700.00	83,219,600.00	#NA	#NA	15.23%	90.10%	93.92%	#NA	#NA	#NA	#NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40,000,000.00	80,842,300.00	88,607,600.00	40,000,000.00	40,000,000.00	6,090,000.00	72,839,700.00	83,219,600.00	#NA	#NA	15.23%	90.10%	93.92%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0.00	13,598,600.00	28,685,600.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	13,598,600.00	28,685,600.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	40,000,000.00	38,193,700.00	39,922,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	6,090,000.00	30,191,100.00	34,534,000.00	#NA	#NA	15.23%	79.05%	86.50%	#NA	#NA	#NA	#NA

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0.00	29,050,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	29,050,000.00	20,000,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50,000,000.00	87,056,000.00	75,796,080.00	74,000,000.00	74,000,000.00	41,927,294.00	73,895,000.00	46,865,000.00	#NA	#NA	83.85%	84.88%	61.83%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50,000,000.00	87,056,000.00	75,796,080.00	74,000,000.00	74,000,000.00	41,927,294.00	73,895,000.00	46,865,000.00	#NA	#NA	83.85%	84.88%	61.83%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25,000,000	21,640,000	35,306,080	17,000,000	17,000,000	23,256,000	21420200.00	11,875,000.00	#NA	#NA	93.02%	98.98%	33.63%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25,000,000	21,116,000	5,500,000	17,000,000	17,000,000	18,671,294	9,675,000.00	0.00	#NA	#NA	74.69%	45.82%	0.00%	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	14,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	12,499,800.00	0.00	#NA	#NA	#NA	89.28%	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	30,300,000	34,990,000	30,000,000	30,000,000	-	30,300,000	34,990,000.00	#NA	#NA	#NA	100.00%	100.00%	#NA	#NA	#NA	#NA

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Bojongsoang dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan cukup baik dengan capaian keuangan yang pada umumnya tinggi. Berdasarkan evaluasi perlunya adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar serapan keuangan dapat lebih berbanding lurus dengan capaian kinerja nyata di lapangan.

Faktor pendorong utama keberhasilan ini antara lain adanya komitmen aparatur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta respons masyarakat yang relatif baik terhadap pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi, serta kendala dalam pengendalian dan monitoring program. Oleh karena itu, meskipun kinerja Kecamatan Bojongsoang telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik masih perlu terus dilakukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran

Dalam penyusunan Renstra, identifikasi terhadap kelompok sasaran menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang dapat tepat guna dan tepat sasaran. Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pelayanan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Penetapan kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Selain itu, kelompok sasaran juga disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, karakteristik wilayah, serta kebutuhan riil masyarakat. Berikut ini adalah kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang selama periode perencanaan tahun 2025–2029:

a. Masyarakat Umum

   Seluruh warga Kecamatan Bojongsoang sebagai penerima layanan administratif dan pelayanan publik, seperti pelayanan kependudukan, surat menyurat, dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan.

b. Perangkat Desa/Kelurahan

   Pemerintah desa/kelurahan yang dibina, difasilitasi, dan diawasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel di tingkat lokal.

c. Lembaga Kemasyarakatan

   Seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan RT/RW, yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat.

d. Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus

   Termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang menjadi perhatian dalam aspek pelayanan dan perlindungan sosial.

e. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

   Yang difasilitasi dalam hal perizinan, pembinaan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

f. Pelajar dan Pemuda

   Yang menjadi target pembinaan karakter, pendidikan nonformal, dan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi oleh kecamatan.

g. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non-ASN Kecamatan

   Sebagai pelaksana teknis program yang memerlukan pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Kecamatan Bojongsoang dalam memberikan pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bojongsoang, keberadaan mitra kerja memiliki peran yang sangat strategis. Kecamatan Bojongsoang tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai unit pelaksana teknis daerah, lembaga vertikal, pemerintah desa, serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan.

Mitra kecamatan terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti UPTD Keluarga Berencana (KB), UPTD Pendidikan, dan UPTD Kesehatan (Puskesmas), yang berperan dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengendalian penduduk. Selain itu, Kecamatan juga bermitra dengan

Polsek Bojongsoang, Koramil Bojongsoang, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta membina kehidupan beragama masyarakat.

Di samping itu, Kecamatan Bojongsoang menjalin kerja sama erat dengan pemerintah desa, yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal, serta didukung oleh peran kelembagaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, BPD, dan forum RT/RW. Keterlibatan mereka menjadi penguat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pembangunan berbasis kebutuhan warga.

Tidak hanya dengan lembaga pemerintahan, Kecamatan Bojongsoang juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan swasta, dan berbagai organisasi masyarakat yang berorientasi pada pelayanan sosial, pendidikan, maupun lingkungan.

Melalui sinergi dengan seluruh mitra tersebut, Kecamatan Bojongsoang berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, partisipatif, serta berdaya guna bagi masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong tercapainya visi pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang LEBIH BEDAS.

Berikut disajikan daftar mitra Kecamatan Bojongsoang beserta peran utamanya dalam mendukung pelayanan public:

Tabel 2. 8 Mitra Kecamatan dalam memberikan pelayanan

No	Mitra Kecamatan	Peran dalam Pelayanan
1	UPTD KB	Melaksanakan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
2	UPTD Pendidikan	Memberikan layanan pendidikan dasar (TK/SD/SMP) serta pembinaan tenaga pendidik
3	UPTD Kesehatan / Puskesmas	Menyelenggarakan layanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan masyarakat.
4	Polsek Bojongsoang	Menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta pelayanan hukum dan perlindungan masyarakat

No	Mitra Kecamatan	Peran dalam Pelayanan
5	Koramil Bojongsoang	Membantu menjaga stabilitas wilayah, ketahanan nasional, serta pembinaan masyarakat dalam bidang pertahanan
6	Kantor Urusan Agama (KUA)	Memberikan layanan pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, dan pembinaan kehidupan beragama.
7	Pemerintah Desa se-Kecamatan Bojongsoang	Menyelenggarakan pelayanan administratif dasar, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
8	PKK Kecamatan dan Desa	Menggerakkan pemberdayaan keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan sosial kemasyarakatan.
9	Karang Taruna	Mengembangkan potensi generasi muda dalam kegiatan sosial, kewirausahaan, dan kepemudaan.
10	LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Mendukung perencanaan pembangunan desa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
11	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat desa, serta menjadi mitra pemerintah desa
12	Forum RT/RW	Membantu pelayanan administrasi kependudukan, komunikasi warga, dan menjaga kerukunan masyarakat.
13	Sektor Swasta (sekolah swasta, klinik, BUMDes, koperasi, dll.)	Memberikan kontribusi layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

No	Mitra Kecamatan	Peran dalam Pelayanan
14	Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Mendukung program sosial, lingkungan, pemberdayaan, dan advokasi masyarakat.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Penelaahan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN 2025–2029 merupakan pedoman utama pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Bojongsoang, dalam merumuskan rencana strategis pembangunan. Dokumen RPJMN ini menetapkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, transformasi ekonomi yang inklusif, serta pembangunan berkelanjutan.

Beberapa prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang relevan dan menjadi fokus dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang antara lain:

a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan administrasi serta pembangunan fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat.
c. Pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM, yang bertujuan memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta sector pertanian.
d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan publik, yang mendukung kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan risiko bencana, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keamanan masyarakat.

2.2.2 Penelahaan Terhadap RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra. RPJMD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bandung selama periode 2025–2029.

RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, termasuk Kecamatan Bojongsoang.

Beberapa prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung yang relevan dengan perencanaan di Kecamatan Bojongsoang antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan efektif, guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui program pendidikan, pelatihan, dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif sebagai basis ekonomi wilayah kecamatan.
d. Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, guna menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung merupakan bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan kecamatan sejalan dengan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta menghindari terjadinya ketidaksinkronan antara program pembangunan dengan pola tata ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga

Kota Bandung, dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh permukiman, kawasan pendidikan, serta potensi pengembangan kegiatan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Selain itu, keberadaan infrastruktur strategis seperti jalan arteri, jaringan irigasi, serta rencana pengembangan transportasi massal juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kecamatan.

Kecamatan Bojongsoang juga termasuk dalam kawasan rawan banjir serta daerah resapan air yang harus dikelola secara hati-hati. Oleh karena itu, program pembangunan diarahkan tidak hanya untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi lingkungan, serta mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, penelaahan RTRW ini memberikan landasan penting bagi Renstra Kecamatan Bojongsoang dalam menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, agar seluruh kebijakan dan program kecamatan dapat berjalan selaras dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Bandung serta berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2029, dilakukan analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan di tingkat kecamatan telah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta selaras dengan arah kebijakan lingkungan hidup daerah.

Hasil kajian KLHS Kabupaten Bandung menekankan beberapa isu lingkungan strategis yang relevan dengan wilayah Kecamatan Bojongsoang, antara lain: penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi, menurunnya fungsi daerah resapan air yang berdampak pada tingginya risiko banjir, pencemaran air sungai akibat limbah rumah tangga maupun aktivitas industri, serta keterancaman lahan pertanian produktif oleh alih fungsi lahan.

Sejalan dengan itu, perangkat daerah di tingkat kabupaten telah menetapkan berbagai arah kebijakan pelayanan yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan kualitas air dan persampahan, penguatan mitigasi bencana banjir, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Bagi Kecamatan Bojongsoang, analisis KLHS ini menjadi dasar untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam program pelayanan kecamatan. Hal ini diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah lingkungan, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta sinergi dengan perangkat daerah terkait dalam pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan perlindungan kawasan strategis lingkungan. Dengan demikian, integrasi hasil KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 3 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Bojongsoang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Bojongsoang berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Bojongsoang diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bojongsoang

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Pelayanan publik di Kecamatan Bojongsoang secara umum telah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan strategis ke depan. Permasalahan ini meliputi aspek administratif, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi Kecamatan Bojongsoang beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pelayanan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

a. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai
b. Prosedur Birokrasi yang kurang efisien
c. Kualitas Pelayanan yang perlu di tingkatkan
d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dan Teknologi pendukung
e. Masih lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan

Tabel 2. 10 Pemetaan Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Jumlah aparatur terbatas
			Rekrutmen pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan
			Kompetensi teknis dan manajerial belum merata

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Prosedur Birokrasi Yang Kurang Efisien	Pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep akuntabilitas kinerja masih terbatas
			Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
			Minimnya pendampingan/assistensi dari instansi pembina dalam penerapan SAKIP di tingkat kecamatan
		Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas
			Inovasi pelayanan masih rendah
			Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Keterbatasan fasilitas, kapasitas dan kompetensi ASN dalam pengelolaan data dan informasi berbasis Sistem Informasi
		Terdapat wilayah dengan kerawanan, banjir, dan permasalahan sampah liar	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, permasalahan utama yang dihadapi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan masih belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan modern, baik dari sisi kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi, maupun etika pelayanan. Minimnya pelatihan berkelanjutan dan tidak adanya sistem pembinaan karier yang berbasis kinerja menyebabkan rendahnya profesionalisme. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya proses pelayanan dan rendahnya kepuasan masyarakat.

Selain itu, prosedur birokrasi yang kurang efisien juga menjadi hambatan besar. Proses administrasi yang terlalu panjang, tumpang tindih, dan kurang memiliki kejelasan alur sering kali menyulitkan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu pelayanan, tetapi juga membuka peluang terjadinya pungutan liar atau praktik tidak etis lainnya. Penyebab utamanya adalah belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Permasalahan semakin diperburuk oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitas pelayanan yang minim dan belum berbasis digital. Ketidaksiapan dalam memanfaatkan teknologi seperti sistem

layanan daring, aplikasi pengaduan masyarakat, atau database kependudukan elektronik, menyebabkan pelayanan berjalan lambat, tidak efisien, dan sering kali tidak akurat. Keterbatasan teknologi tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga menjauhkan pemerintah dari harapan masyarakat yang menginginkan akses cepat dan mudah.

Terakhir, wilayah Bojongsoang masih menghadapi tantangan serius terkait kerawanan bencana, khususnya banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut diperburuk dengan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia, sehingga penanganan limbah tidak berjalan efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya semakin memperparah permasalahan. Situasi ini menuntut adanya upaya peningkatan sarana pengelolaan sampah sekaligus penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat..

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini saling terkait dan menunjukkan bahwa dibutuhkan reformasi pelayanan publik secara menyeluruh di tingkat kecamatan.

2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Penentuan isu strategis merupakan tahapan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2029. Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan, evaluasi kinerja sebelumnya, serta hasil analisis kondisi internal dan eksternal kecamatan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berikut table penelaahan isu strategis:

Tabel 2. 11 Penelaahan Isu Strategis Kecamatan Bojongsoang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah perumahan	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Transformasi Digital	Bonus Demografi	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah perumahan	Prosedur Birokrasi Yang Kurang Efisien	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah perumahan	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah perumahan	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Keterbatasn Perangkat teknologi informasi dan kemampuan ASN dalam mengoperasikan	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah perumahan	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Berdasarkan hasil penelaahan isu strategis Kecamatan Bojongsoang, terdapat sejumlah potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan, terutama pada aspek pelayanan publik tingkat dasar dan daerah perumahan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Pertama, terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai, muncul isu rendahnya kualitas aparatur. Hal ini relevan dengan isu KLHS berupa transformasi digital serta bonus demografi di tingkat global dan nasional, serta kualitas dan daya saing sumber daya manusia di tingkat regional. Oleh karena itu, isu strategis yang ditetapkan adalah optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

Kedua, permasalahan prosedur birokrasi yang masih kurang efisien serta sinkronisasi program antar-OPD yang belum optimal menjadi hambatan dalam pelayanan. Kondisi ini berkaitan dengan isu global berupa belum optimalnya tata kelola pemerintahan akibat kurangnya keselarasan antarprogram, sementara isu nasional yang relevan adalah desentralisasi dan otonomi daerah, serta isu regional terkait kualitas tata kelola pemerintahan. Isu strategis yang diambil adalah peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan.

Ketiga, kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan terkait erat dengan isu belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Isu global yang memengaruhi adalah transformasi digital, isu nasional berupa desentralisasi dan otonomi daerah, serta isu regional tentang kualitas tata kelola pemerintahan. Dari kondisi tersebut, dirumuskan isu strategis berupa peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Selain itu, terdapat pula permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi serta kemampuan ASN dalam mengoperasikannya. Hal ini terkait dengan isu global transformasi digital, isu nasional desentralisasi dan otonomi daerah, serta isu regional mengenai kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, isu strategis yang ditetapkan adalah optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

Terakhir, wilayah Kecamatan Bojongsoang masih menghadapi kerentanan bencana seperti longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar. Hal ini relevan dengan isu KLHS mengenai belum optimalnya

penanganan tanggap darurat bencana. Secara global, isu ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, sedangkan di tingkat nasional berkaitan dengan keberlanjutan daya dukung dan ketahanan bencana, serta di tingkat regional terkait daya tampung lingkungan. Dari permasalahan ini, dirumuskan isu strategis berupa peningkatan penanganan permasalahan sampah serta pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang

Penyusunan Resntra Tahun 2025–2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan visi pembangunan daerah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas."

Visi tersebut merupakan cerminan dari arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung dalam menghadapi tantangan dan peluang menuju kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima (5) misi pembangunan daerah, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.
b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
c. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
e. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bojongsoang disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung, dan berpedoman pada visi dan misi Bupati.

Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang, potensi wilayah, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat

kecamatan. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan selama periode 2025–2029.

3.1.1 Tujuan

Tujuan utama pembangunan Kecamatan Bojongsoang pada periode 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan langsung, baik terkait administrasi kependudukan, perizinan tertentu, maupun fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang profesional, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan berintegritas. Selain itu, Kecamatan Bojongsoang juga berkomitmen untuk memperluas akses pelayanan yang merata, meningkatkan standar pelayanan minimal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Bojongsoang menetapkan Tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan, dengan indicator capaian berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator capaian berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Pembangunan Kecamatan Bojongsoang sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator capaian berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nilai Barang Milik Daerah (BMD)/asset dalam kondisi baik.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan indikator capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat.
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, dengan indikator capaian berupa Persentase Desa Cepat Berkembang.

Dengan tujuan ini, diharapkan pelayanan publik di Kecamatan Bojongsoang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan administratif masyarakat, tetapi juga mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran strategis Kecamatan Bojongsoang pada periode 2025–2029 adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, sekaligus sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui penguatan standar pelayanan minimal, percepatan proses pelayanan yang sederhana dan transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur juga menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan yang ramah, responsif, dan berintegritas.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat prinsip *good governance* dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Melalui tata kelola yang baik, Kecamatan Bojongsoang diharapkan mampu mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di wilayahnya, sekaligus meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten, maupun pihak swasta dan masyarakat.

Dengan tercapainya sasaran ini, Kecamatan Bojongsoang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga menjadi organisasi pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan dipercaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang maju, tertib, dan sejahtera.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,28	92,48	92,70	92,93	93,17	93,42	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra, Kecamatan Bojongsoang merancang penahapan pembangunan secara sistematis setiap tahunnya selama periode 2026 hingga 2030. Penahapan ini disusun sebagai langkah operasional dan evaluatif guna memastikan ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Tahap I (2026) Kecamatan Bojongsoang menargetkan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih representatif, serta peningkatan mekanisme pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Di sisi lain, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dilakukan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Tahap II (2027) Kecamatan Bojongsoang menargetkan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih modern dan representatif, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, dilakukan langkah nyata dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan potensi dan permasalahan lokal, sehingga tercipta solusi yang relevan dengan kondisi lapangan.

Tahap III (2028) Kecamatan menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan berbasis digital, dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat integrasi sistem, serta memastikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan difokuskan pada pengembangan potensi lokal, dengan cara memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi ini akan menghasilkan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Tahap IV (2029) Kecamatan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital secara menyeluruh, dengan mendorong inovasi, memperkuat infrastruktur teknologi, serta memastikan standar pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

Tahap V (2030) Kecamatan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui pemanfaatan layanan digital secara optimal, dengan mengedepankan inovasi, memperkuat dukungan teknologi, serta menerapkan standar pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, serta mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat dan era digital. Pada saat yang sama, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan difokuskan pada penguatan potensi lokal secara berkesinambungan melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 2 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Bojongsoang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bojongsoang tahun 2025-2029

Berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 dan operasionalisasi NSPK, Kecamatan Bojongsoang menyusun arah kebijakan Renstra yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan peningkatan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bojongsoang tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel, serta berbasis digital dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan era digitalisasi dan harapan masyarakat akan layanan pemerintahan yang cepat, mudah, dan dapat diakses secara luas.

Arah kebijakan di bidang pelayanan publik menekankan pada penguatan tata kelola administrasi pemerintahan melalui penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, pemanfaatan aplikasi digital, serta integrasi data kependudukan dan layanan administrasi lainnya. Dengan demikian, proses pelayanan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan minim hambatan birokrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan dan desa menjadi prioritas agar mampu memberikan layanan yang profesional, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai subjek utama pembangunan. Kecamatan berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan peran kader pembangunan, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi inovasi dan inisiatif masyarakat. Pemberdayaan ini difokuskan tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga pada peningkatan literasi digital, keterampilan kewirausahaan, serta pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan.

Dengan sinergi antara peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Kecamatan Bojongsoang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2026

No.	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mendukung pencapaian sasaran Kecamatan, setiap program harus dirancang secara terukur melalui penetapan indikator, target, dan pagu indikatif. Ketiga elemen ini menjadi komponen utama dalam memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan. Indikator program digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Indikator tersebut disusun secara kuantitatif maupun kualitatif, agar mampu menggambarkan capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program secara objektif. Dengan adanya indikator yang jelas, evaluasi terhadap keberhasilan program dapat dilakukan secara berkala dan sistematis.

Target program menggambarkan tingkat pencapaian yang ingin diraih dalam kurun waktu 2025–2029 dengan akhir tahun perencanaan pada tahun 2030. Penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual, potensi daerah, serta sumber daya yang tersedia, sehingga tetap realistis namun tetap mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Sementara itu, pagu indikatif menjadi acuan awal dalam pengalokasian anggaran untuk setiap program. Pagu ini membantu memastikan bahwa sumber daya fiskal daerah dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan, sesuai prioritas pembangunan. Dengan menyajikan indikator, target, dan pagu indikatif secara rinci, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan secara lebih fokus, terukur, dan akuntabel.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang tahun 2025- 2029 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima (5) tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Bojongsoang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya BMD dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik
				Terlaksanakanya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksanakanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Tersedianya Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.01.2.09.0009 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksanakanya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyaraka	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 – Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 -Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN				5,224,543,548		4,758,194,600		4,861,313,000		4,913,495,900		5,112,153,260	
KECAMATAN				5,224,543,548		4,758,194,600		4,861,313,000		4,913,495,900		5,112,153,260	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00 Poin	61 Poin	4.621.014.608	62 Poin	4.562.017.000	63 Poin	4.562.017.000	64 Poin	4.562.017.000	65 Poin	4.562.017.000	S.3.1
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0,00 Poin	56,50 Poin		57,00 Poin		57,50 Poin		58,00 Poin		58,50 Poin		S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73,00 Poin	74,00 Poin	41.730.000	74,00 Poin	24.088.000	74,00 Poin	24.088.000	74,00 Poin	24.088.000	74,00 Poin	24.088.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3,060,000	2 Dokumen	1,999,000	2 Dokumen	1,999,000	2 Dokumen	1,999,000	2 Dokumen	1,999,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,530,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,060,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,530,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	3,060,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	1 Dokumen	794,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			12,000,000		500,000		500,000		500,000		500,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			10,800,000		500,000		500,000		500,000		500,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	3,818,047,000	100 %	3,818,047,000	100 %	3,818,047,000	100 %	3,818,047,000	100 %	3,818,047,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3,815,347,000	18 Orang/bulan	3,815,347,000	18 Orang/bulan	3,815,347,000	18 Orang/bulan	3,815,347,000	18 Orang/bulan	3,815,347,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,0000	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	2 Dokumen	900,000	2 Dokumen	900,000	2 Dokumen	900,000	2 Dokumen	900,000	2 Dokumen	900,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100 %	35,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang	35,000,000	30 Orang	5,000,000	30 Orang	5,000,000	30 Orang	5,000,000	30 Orang	5,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	208,113,228	100 %	96,248,000	100 %	96,248,000	100 %	96,248,000	100 %	96,248,000	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	149,595,228	1 Paket	62,730,000	1 Paket	62,730,000	1 Paket	62,730,000	1 Paket	62,730,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,018,000	1 Paket	3,018,000	1 Paket	3,018,000	1 Paket	3,018,000	1 Paket	3,018,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	432,402,360	100 %	323,400,000	100 %	323,400,000	100 %	323,400,000	100 %	323,400,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	95,402,360	1 Laporan	42,000,000	1 Laporan	42,000,000	1 Laporan	42,000,000	1 Laporan	42,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	337,000,000	1 Laporan	281,400,000	1 Laporan	281,400,000	1 Laporan	281,400,000	1 Laporan	281,400,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	83 %	83 %	35,000,000	83 %	35,000,000	83 %	35,000,000	83 %	35,000,000	83 %	35,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,000,000ulang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2 Unit	10,000,000	2 Unit	10,000,000	2 Unit	10,000,000	2 Unit	10,000,000	2 Unit	10,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	92,10	Poin	92,48 Poin	309,000,960	92,70 Poin	309,000,960	92,93 Poin	309,000,960	93,17 Poin	309,000,960	93,42 Poin	309,000,960	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	%	100 %	25,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	100 %	5,000,000	100 %	2,500,000	100 %	2,500,000	100 %	2,500,000	100 %	2,500,000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan	100 %	100 %	279,000,960	100 %	300,824,600	100 %	403,943,000	100 %	456,125,900	100 %	654,783,260	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	274,000,960	1 Laporan	295,824,600	1 Laporan	398,943,000	1 Laporan	451,125,900	1 Laporan	649,783,260	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	142,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	S.3.1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %	30,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	10,000,000	8 Laporan	7,500,000	8 Laporan	7,500,000	8 Laporan	7,500,000	8 Laporan	7,500,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	100 %	60,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 paket	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Dokumen	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100 %	52,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyaraka	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat		50 Keluarga	13,000,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	13,000,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	13,000,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		50 Keluarga	13,000,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	50 Keluarga	2,500,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	37,500,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	12,500,000	50 Keluarga	10,000,000	50 Keluarga	10,000,000	50 Keluarga	10,000,000	50 Keluarga	10,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	7,500,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	25,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	100 %	25,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	100 %	98,000,000	100 %	38,000,000	100 %	38,000,000	100 %	38,000,000	100 %	38,000,000	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	98,000,000	100 %	38,000,000	100 %	38,000,000	100 %	38,000,000	100 %	38,000,000	
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	30 Orang	50,000,000	30 Orang	5,000,000	30 Orang	5,000,000	30 Orang	5,000,000	30 Orang	5,000,000	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	50 Orang	50 Orang	30,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	15,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	1 Dokumen	18,000,000	1 Dokumen	18,000,000	1 Dokumen	18,000,000	1 Dokumen	18,000,0000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	64,440,000	100 %	53,000,000	100 %	53,000,000	100 %	53,000,000	100 %	53,000,000	S.3.1
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100 %	100 %	64,440,000	100 %	53,000,000	100 %	53,000,000	100 %	53,000,000	100 %	53,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	100 %	19,440,000	100 %	8,000,000	100 %	8,000,000	100 %	8,000,000	100 %	8,000,000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang mendukung sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan akuntabel, efektif, dan efisein

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung dalam dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dilakukan perumusan program-program pembangunan daerah dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam periode masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Kabupaten Bandung menetapkan 13 program prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang melaksanakan berbagai subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dilaksanakan sebagai bentuk konkret dari strategi pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Subkegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pencapaian program prioritas melalui kegiatan yang lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan. Pelaksanaan subkegiatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan potensi lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya uraian subkegiatan ini, diharapkan setiap langkah pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkesinambungan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	
		Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja utama merupkan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja utama atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan dengan indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja, baik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja utama harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja utama Kecamatan Bojongsoang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bojongsoang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2026

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Penetapan Laju IKM sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan prosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju nilai IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Bojongsoang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Kecamatan Bojongsoang selama periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjamin keterukuran dan akuntabilitas atas pelaksanaan urusan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur capaian kinerja strategis selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan adanya IKK, diharapkan Kecamatan Bojongsoang mampu mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara lebih fokus dan strategis, serta memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan benar- benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara rinci, penjabaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Bojongsoang, 2025

Sebagai indikator kinerja kunci, Laju IKM tidak hanya menunjukkan kualitas pelayanan dari sudut pandang aparatur, tetapi lebih penting lagi merefleksikan persepsi dan pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, peningkatan laju IKM menjadi dorongan bagi Kecamatan Bojongsoang untuk terus mengembangkan pelayanan yang cepat, transparan, adil, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan terjaganya dan meningkatnya nilai Laju IKM, diharapkan terbangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, terwujud kepuasan masyarakat, serta tercapai tata kelola pelayanan yang semakin efektif, efisien, dan responsif sesuai dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan ringkasan inti yang mencerminkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta strategi pencapaian tujuan suatu instansi atau pemerintah daerah dalam periode lima tahunan. Renstra menjadi dokumen fundamental yang mengarahkan semua program dan kegiatan agar berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, dokumen Renstra merupakan peta jalan strategis yang menuntun Kecamatan agar berjalan dalam jalur yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung. Renstra menjembatani antara harapan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, kesimpulan substansial dari Renstra tidak hanya terletak pada isi perencanaan, tetapi juga pada komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan yang terukur dan partisipatif.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bojongsoang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan secara sinergis dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2030 telah dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030.
b. Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025–2030 wajib dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bojongsoang setiap tahunnya, dengan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.

c. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Renstra Kecamatan Bojongsoang harus dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DPA) Kecamatan Bojongsoang.
d. Apabila terdapat kebijakan penganggaran bagi Kecamatan Bojongsoang yang tidak sesuai atau belum tercantum dalam Renstra ini, maka akan dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025– 2030, sebagaimana tercermin dalam dokumen Renja-PD Kecamatan Bojongsoang, wajib dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bojongsoang merupakan instrumen penting dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat kecamatan maupun pemerintah desa berada pada jalur yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, baik dari aspek waktu, sasaran, maupun capaian indikator kinerja melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Kecamatan Bojongsoang dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme monitoring secara berkala terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Monitoring ini mencakup aspek realisasi fisik maupun keuangan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, kecamatan juga melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan serta mencari solusi yang tepat secara cepat dan terukur.

Sementara itu, evaluasi pembangunan dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan forum evaluasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait capaian pembangunan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Dengan adanya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang sistematis, Kecamatan Bojongsoang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Soreang, September 2025

CAMAT BOJONGSOANG

Ttd

KANKAN TAUFIK BARNAWAN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 23
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Pangkat,Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025 23
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Yang Telah Melaksanakan Diklat PIM Tahun 2025 24
Tabel 2. 4 Inventaris Aset Kecamatan Bojongsoang 24
Tabel 2. 5 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bojongsoang Tahun 2022-2026 41
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 44
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bojongsoang kabupaten Bandung 61
Tabel 2. 8 Mitra Kecamatan dalam memberikan pelayanan 71
Tabel 2. 9 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 76
Tabel 2. 10 Pemetaan Masalah 77
Tabel 2. 11 Penelaahan Isu Strategis Kecamatan Bojongsoang 80

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2029 87
Tabel 3. 2 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2029 89
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2026 91

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Bojongsoang 93
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan 104
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah 115
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 – 2026 117
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci 118

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bojongsoang 18